

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN PERUBAHAN ARUS JALAN

Nurul Hidayat¹, Nadya Aulia Ningrum², Rafli Ramanda³, Iqbal Saputra⁴, Irma Yusriani Simamora⁵

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : hdytnr1040@gmail.com

ABSTRAK

Komunikasi Pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan social yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan. Dalam penelitian ini, pembangunan yang dimaksudkan yaitu Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan baru mengenai perubahan arus jalan di sekitar 12 titik yang diberlakukan pada November 2022, disamping sedang melaksanakan pembangunan di beberapa tempat. Pembangunan ini disampaikan melalui komunikasi kepada masyarakat untuk melihat keefektifan dari kebijakan yang dibuat. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini untuk mereduksi kemacetan dan menertibkan lalu lintas. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pembangunan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan mengenai perubahan arus jalan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan oleh peneliti merupakan data langsung yang disampaikan oleh informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disetiap kebijakan yang diberlakukan tentu mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat Kota Medan, namun berbicara tentang efek dari kebijakan tersebut untuk masyarakat tergantung dari persepsi masyarakat yang menilainya. Yang pasti kebijakan ini diberlakukan untuk kemaslahatan dan keselamatan bersama, tidak untuk pribadi dari Pemerintah Kota Medan. Dengan harapan kebijakan ini dapat membangun Kota Medan menjadi Kota yang aman, nyaman, tertib dan sejahtera untuk masyarakat yang berada didalamnya.

Keywords: Komunikasi Pembangunan, Arus Jalan, Pemerintah Kota Medan

1. PENDAHULUAN

Komunikasi pembangunan dapat diartikan secara luas ialah proses timbal balik yang meliputi sebuah peran dan fungsi dari komunikasi, yang dimana semua pihak ikut terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah, mulai

dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan tersebut. (Nasution, 1996). Sedangkan kata pembangunan sendiri bisa diartikan sebagai proses dari perubahan sosial yang menuju kepada tatatan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (Harun & Ardianto, 2017).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menjalankan fungsinya untuk melakukan pembangunan Nasional. Dimana pembanguan tersebut sebagai sebuah proses agar terwujudnya perubahan yang lebih baik secara terencana. Proses perubahan tersebut mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pertahanan, teknologi, kelembagaan dan kebudayaan. Dengan begitu upaya wewenang dari pemerintah pusat akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab atas segala tugas dan fungsinya. Fungsi utama dari pemerintah ialah pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada didaerahnya sendiri. Untuk itu Pemerintah Kota Medan telah melakukan peran dan menjalankan tanggung jawabnya. Dimana masalah dasar yang terus mengakar di Kota Medan ialah kemacetan lalu lintas yang semakin hari terlihat semakin parah. Mengatasi kemacetan di Kota Medan bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah, butuh waktu dan perencanaan yang cukup panjang sebelum diputuskannya suatu tindakan.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Medan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas ialah dengan membuat perubahan arus jalan sebanyak 12 arus jalan yang berubah menjadi satu arah, diantaranya ada Jl. Bambu II, Jl. Karantina, Jl. Muchtar Basri, Jl. Irian

Barat dan Jl. Jawa, Jl. Zainul Arifin dan Jl. Palang Merah, Jl. Gaharu, Jl. Gudang (Putri Merak Jingga), Jl. Zainul Arifin, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. HM Yamin, Jl. Mongonsidi, Jl. Pattimura, Jl. Sudirman. Keputusan ini sudah di persiapkan lebih dari 1 tahun lamanya, namun berhasil di laksanakan pada bulan November 2022. (Arief). Upaya ini dilakukan sebagai solusi terakhir untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. Disebabkan pemerintah Kota Medan sudah tidak bisa lagi jika harus membuat pelebaran jalan. Untuk itulah Pemerintah Kota Medan menentukan keputusan ini yang tentunya tidak bekerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, kepolisian dan perwakilan-perwakilan dari masyarakat itu sendiri.

Perubahan arus jalan yang sudah diterapkan hampir satu tahun ini tentunya didukung oleh sebuah tindakan komunikasi. Komunikasi tersebut tentulah komunikasi pembangunan, didalam komunikasi pembuangan ini tentunya sama dengan komunikasi pada umumnya. Kesamaan itu bisa dilihat dari unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Akan tetapi dalam komunikasi pembangunan hanya ada 3 unsur saja, diantaranya ada komunikator ialah pemerintah, pesan nya adalah kebijakan dan komunikannya ialah masyarakat yang ada pada daerah tersebut. (Siregar, Rohani, & Devianty, 2023)

Efektivitas yang dihasilkan melalui media massa untuk menjalan Komunikasi pembangunan ini tentu dapat dilihat dari kondisi kota Medan yang

sekarang. Dimana untuk memberitahukan suatu kebijakan tentunya pemerintah memiliki akses media tersendiri yaitu media massa, diantaranya ada surat kabar, artikel, flyer yang di share melalui VMS (Variable Message Sign) yang terdapat pada beberapa persimpangan jalan di inti Kota, media sosial dan media berita lainnya. Maka efektivitas yang didapat dirasakan ialah masyarakat tidak lagi terkejut saat di berlakukannya perubahan arus jalan ini, selain itu masyarakat sangat mudah dalam beradaptasi dengan rute-rute terbaru.

Selain efektivitas yang dihasilkan media massa dalam proses komunikasi pembangunan ini, tentunya harus dilihat terlebih dahulu efektivitas dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Efektivitas pembangunan ternyata hanya sebatas untuk melihat seberapa efektif nya program yang dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat. Maka dari itu, hal ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk melihat sejauh mana tingkat ke-efektivan dari komunikasi pembangunan terhadap masyarakat sampai pada saat ini. (Culip, 20:554).

Terkait pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ini, peneliti sendiri memiliki tujuan yang mana memfokuskan penelitian ini mengenai efektivitas dari komunikasi pembangunan terkait solusi yang diambil untuk penguupayaan pembangunan agar Kota Medan dapat menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu peneliti memfokuskan penelitian kepada Dinas Perhubungan yang langsung ditunjuk oleh pemerintah kota untuk mengatasi

permasalahan dan juga upaya pembangunan di Kota Medan ini sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode penulisan kualitatif ini sendiri merupakan metode penulisan yang digunakan untuk melakukan sebuah kepenulisan secara alamiah pada suatu objek. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. (Sugiyono, 2008 : 1)

Data yang didapatkan oleh peneliti merupakan data langsung yang disampaikan oleh informan penelitian sebanyak 7, informan penelitian yaitu dari pihak Dinas perhubungan yang langsung bersumber dari kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, Kepala Seksi Angkutan dan Jalan Ranto Agustinus Simanungkalit, serta dari beberapa masyarakat kota medan yang berinisial ES, AD, NH, NAN, RR. Sehingga menghasilkan sebuah data deskripsi berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna serta nilai ataupun pengertian. Informasi yang digali juga berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait efektivitas perubahan arus jalan yang merupakan salah satu tindakan pembangunan di Kota Medan itu sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dan Pembangunan merupakan dua hal yang saling berhubungan erat, dimana Siebert,

Peterson dan Schramm menyatakan bahwa dalam mempelajari sistem komunikasi manusia, seseorang harus memperhatikan beberapa kepercayaan dan asumsi dasar yang dianut suatu masyarakat tentang asal usul manusia, masyarakat dan Negara. (Armawan, 2021). Komunikasi merupakan ilmu yang multi disiplin. Komunikasi diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam ranah pembangunan. Dalam proses pembangunan tentu diperlukan adanya proses komunikasi baik kepada masyarakat luas ataupun kepada pihak terkait. (Siregar, Rohani, & Devianty, 2023)

Komunikasi bertujuan untuk perkembangan dan peningkatan pembangunan manusia, yang berarti adalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan diupayakan untuk dihapuskan. Dengan demikian komunikasi pembangunan menjadi aspek penting dalam hal hubungan antara dua pihak yaitu masyarakat dan pemerintahan.

Sedangkan pembangunan sendiri merupakan sebuah usaha yang dilakukan, dimana usaha-usaha mengembangkan masyarakat dilakukan agar mereka memperoleh peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun sisi spritual (Hendra, 2019).

Dalam hal ini, Walikota Medan mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan arus jalan, dari dua arah menjadi satu arah guna menertibkan lalu lintas. Kebijakan ini direncanakan satu tahun lamanya sebelum akhirnya

direalisasikan pada November 2022. Kebijakan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian serta perwakilan-perwakilan dari masyarakat untuk menjalankannya.

Ada sekitar 12 arus jalan yang berubah dari dua arah menjadi satu arah, diantaranya yaitu Jl. Bambu II, Jl. Karantina, Jl. Muchtar Basri, Jl. Irian Barat dan Jl. Jawa, Jl. Zainul Arifin dan Jl. Palang Merah, Jl. Gaharu, Jl. Gudang (Putri Merak Jingga), Jl. Zainul Arifin, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. HM Yamin, Jl. Mongonsidi, Jl. Pattimura, Jl. Sudirman. (Arief). Upaya ini dilakukan sebagai solusi terakhir untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. Disebabkan pemerintah Kota Medan sudah tidak bisa lagi jika harus membuat pelebaran jalan.

Disetiap kebijakan tentu ada pertimbangan sebelum diberlakukan ketengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kota Medan saat ini tengah menjalankan pembangunan Underprass di beberapa titik seperti, kota lama Kesawan, HM Yamin, Simpang Juanda, pajak ikan dan sebagainya, juga pembangunan Overprass seperti revitalisasi Lapangan Merdeka, trotoar dan lainnya. Dari pembangunan tersebut tentu akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang padat, sehingga solusi yang ditawarkan untuk mengurai kemacetan ini adalah dengan mengubah arus jalan dari yang tiga menjadi dua, dua menjadi satu. Perubahan-perubahan ini yang menjadi tolak ukur bagaimana caranya agar membuat lalu lintas dengan kemacetan yang parah ini, yang berakibat kepada pemerintah Kota Medan kedepannya

harus diantisipasi sejak dini. Maka dari itulah, diberlakukan kebijakan ini mengingat Kota Medan menjadi bahan pembicaraan dengan kemacetan yang parah dan pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas yang ada.

Tujuan utama dari perubahan arus jalan ini ialah untuk menertibkan arus lalu lintas meminimalisir kemacetan di arus mayor yang sangat rawan terjadi kemacetan, namun juga menimbulkan kemacetan di jalan lain akan tetapi jalan tersebut arus minor lalu lintas rendah. Mengingat, adanya pembangunan di kawasan Kota Lama Kesawan tepatnya di Jl. Ahmad Yani yang kapasitas jalannya semakin menyempit, yang awalnya 12m menjadi 6m. Hal ini diakibatkan karena adanya pembangunan pedestrian, dan juga penutupan di Jl. Perniagaan yg sudah tidak bisa dilewati kendaraan lagi, maka Dinas Perhubungan melakukan kajian peralihan arus lalu lintas yg semula kendaraan yg dari arah Selatan menuju inti Kota melewati Jl. Ahmad Yani, dialihkan ke Jl. Irian dan Jawa yg sekarfng satu arah kearah Utara. Setiap kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah Kota Medan tujuannya hanya satu yaitu untuk kemaslahatan dan keselamatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi dari Dinas Perhubungan, Walikota dan lainnya.

Kebijakan ini diputuskan tidak serta merta tanpa adanya survey terlebih dahulu dan sosialisasi kepada masyarakat. Tentu survey dilakukan dengan pertimbangan yang besar selama jangka waktu satu tahun lamanya yang dilakukan berkolaborasi dengan instansi

lainnya seperti Kasatlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dll. Setelah kebijakan ini diputuskan untuk diberlakukan, maka tentu dilakukan sosialisasi dengan strategi-strategi berdasarkan media (*media-based strategies*). Hal ini dilakukan karena menilai bahwa media lebih cepat dalam penyebaran informasinya dan dapat menyeluruh kepada masyarakat.

Media yang digunakan Dinas Perhubungan dan Polisi Daerah Kota Medan ketika saat ingin berkomunikasi mengenai perubahan arus jalan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial dan media massa. Media massa yang digunakan seperti Radio, Koran, flayer yang di share melalui VMS (Variable Message Sign) yang terdapat di beberapa persimpangan jalan di inti Kota Medan. Media sosial yang digunakan seperti Instagram dalam akun Pemko Medan dan Dishub Medan, juga WhatsApp (person to person). Media berita online seperti detik.com, medan.tribunnews.com, medan.kompas.com, rmolsumut.id dan lain-lain. Sasaran dari sosialisasi ini tentu keseluruhan masyarakat Kota Medan tanpa memandang usia dan bentuk kendaraan antara roda dua atau roda empat.

Penggunaan media ini sebagai efektivitas untuk mensinkorinasikan semuanya (rencana pembangunan Kota Medan, dalam penelitian ini perubahan arus jalan) menjadi bagian yang integral, sinergis untuk pembangunan yang akan berdampak kepada semua masyarakat Kota Medan. Keterbukaan informasi ini

bisa diakses warga Kota Medan dan masyarakat umum sebagai bukti Pemerintah Kota Medan adalah pemerintahan yang terbuka.

Melalui media Pemerintah Kota Medan berupaya untuk melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat demi memudahkan program-program yang dijalankan oleh pemerintah yang berfokus kepada pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Media ini sebagai jembatan untuk melihat proses komunikasi pembangunan bisa berjalan dengan selaras dan menimbulkan kesepahaman bersama tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Sementara itu, hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis memberikan keterangan yaitu:

“Setiap kebijakan yang diberlakukan tentu tidak serta merta dengan mudah diterima oleh masyarakat, pasti ada kendala dan respon yang didapat.

Karena ada pro dan kontra dari masyarakat, sama halnya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Medan mengenai perubahan arus jalan. Disisi lain adanya kritik dan saran yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah. Selama menerapkan perubahan arus jalan di Kota Medan ini tentu tidak mudah dijalankan.

Banyak hal yang terjadi mulai dari respon masyarakat yang menilai kebijakan ini tidak efektif melainkan menyulitkan mereka dan berdampak negatif, namun juga ada yang memberikan respon positif. Maka dari

itu, kebijakan ini membutuhkan waktu setahun lamanya, agar kiranya kita dapat mengatasi segala bentuk penolakan dan kritik dari masyarakat, karena bagaimanapun itu adalah reaksi yang wajar dari setiap kebijakan yang diberlakukan. Itu berarti sosialisasi yang kami lakukan juga selama satu tahun melalui berbagai media terbilang efektif karena sampai ketengah-tengah masyarakat”.

Dari beberapa informan yang telah merasakan efek dari kebijakan perubahan arus jalan ini, didapatkan bahwa ada beberapa yang mengatakan kebijakan ini sangat bagus, jalan semakin lebar dan jarak dirinya untuk pulang kerumah semakin dekat. Namun, ada beberapa yang merasakan bahwa kebijakan ini membuat jarak perjalanan semakin jauh karena harus memutar dari arah yang ditentukan, belum lagi di beberapa titik terdapat kemacetan dan cost penggunaan bahan bakar juga menjadi semakin meningkat. Namun alternative inilah yg masih bisa digunakan di Kota Medan seiring nntinya akan ada pembangunan Underpass di Kota Medan.

Di samping itu, saran yang diterima oleh Dinas Perhubungan terkait kebijakan ini adalah bahwa seharusnya ada personil yang ditempatkan di beberapa titik baik persimpangan maupun pertigaan yang rawan akan terjadinya kemacetan. Personil yang ditempatkan ini juga cukup sehingga mampu mengurus kemacetan yang terjadi, mengingat selama kebijakan berlangsung kemaatan masih terlihat, dan

banyak yang masih menerobos lalu lintas. Penempatan personil ini juga berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, melihat bahwa himbauan dari elektronik belum memumpuni maka harus dilakukan secara manual kembali untuk mencegahnya. Pencegahan ini akan berhasil tergantung dari masyarakat yang berkendara untuk lebih aware terhadap keadaan sekitar dan sadar akan rambu lalu lintas yang ada.

Untuk melihat apakah kebijakan ini memberikan nilai positif ataupun negatif, hal ini dikembalikan kepada persepsi masing-masing masyarakat. Sebab setiap kebijakan tentu diberlakukan karena memberikan nilai dan dampak yang positif kepada masyarakat, namun apabila masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini bernilai negatif, hal demikian tidak bisa disalahkan karena itu adalah persepsi masing-masing. Karena setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra dari masyarakat, maka penilaian yang berbeda tentulah hal yang wajar didapatkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Berbicara tentang hambatan, pada dasarnya tidak ada hambatan besar selama kebijakan ini berlangsung, hambatan kecil itu adalah hal-hal yang sedang diusahakan untuk diwujudkan dari tujuan diberlakukannya kebijakan ini. Perubahan arus jalan adalah manajemen terakhir dari sisi Undang-Undang Dasar Lalu Lintas, maka kebijakan ini akan diberlakukan dalam jangka panjang. Namun, tetap dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk melihat seberapa efektif kebijakan ini jika diberlakukan dalam jangka yang panjang.

Maka dari itu, ditemukan bahwa dengan adanya keefektifan dari komunikasi pembangunan dalam setiap kebijakan memperlihatkan bahwa ada keterikatan antara Pemerintah Kota Medan dengan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tersampainya pesan dari pemerintah untuk masyarakat mengenai kebijakan perubahan arus jalan yang diberlakukan. Dengan keefektifan komunikasi pembangunan inilah akhirnya setiap pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan mampu dijalankan dengan baik, sekalipun terdapat tindak penolakan dari masyarakat juga tidak menjadikan sebuah hambatan. Karena dengan adanya komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang sejauh mana proses pembangunan itu diperlukan, bagaimana peran serta support dari berbagai pihak guna mensukseskan rencana pembangunan tersebut.

4. KESIMPULAN

Hasil dari efektivitas komunikasi pembangunan pemerintah kota Medan mengenai perubahan 12 arus jalan yang diambil sebagai solusi terakhir untuk mengatasi permasalahan kemacetan itu sendiri dapat dilihat bahwa sampai sekarang masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan rute jalan yang berubah. Akan tetapi lebih dari itu tetap ada nilai negatif yang didapat yaitu efek tidak sejalan yang diberikan oleh masyarakat sehingga tidak sesuai dengan harapan pemerintah seperti masyarakat yang memberikan tindakan protes dan

tetap melanggar aturan. Akan tetapi tidak menjadi suatu hambatan sebab untuk memutuskan kebijakan dibutuhkan waktu yang lama, orang-orang yang memiliki peran penting dan memiliki tujuan yang sejalan dengan pembangunan itu sendiri.

Media hadir di setiap keputusan pemerintah kota semata-mata sebagai sarana ataupun wadah untuk menyampaikan suatu pesan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. seperti halnya dalam perubahan kebijakan 12 arus jalan ini yang di mana dengan adanya media yang terus menyampaikan dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat sehingga memudahkan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan perubahan arus jalan ini kepada masyarakat itu sendiri. Maka dari media itu sendiri juga bisa dilihat seberapa efektivitas komunikasi pembangunan, yang dimana jika semakin sedikit berita ataupun informasi penolakan dari masyarakat maka sebagai bukti bahwa tindakan perubahan arus jalan di kota medan semakin efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, R. & Ardianto, E. (2017). *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Depok: Raja Wali Press.
- Nasution, Z. (1996). *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- M, Cutlip. S. dkk. (2000). *Effective Public Relations*. New Jersey : Upper Saddle River.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- ‘Alam. A. F. 2016. Simulasi Pengaruh Manajemen Arus Jalan Dua Arah Menjadi Arus Jalan Searah. Skripsi. Program Studi Teknik Mesin dan Industri. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Setiawan. E. H. 2021. Efektivitas Komunikasi Gubernur Dalam Sinkronisasi Pembangunan Daerah Di Jawa Barat. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Pandjajaran Jatinangor.
- Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. *Dawatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* , 1, 84-95.
- Hendra, T. (2019). Media Massa Dalam Komunikasi Pembangunan. *JURNAL AT-TAGHYIR* , 1, 136-152.
- Siregar, R. B., Rohani, L., & Devianty, R. (2023). Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Komunikasi Pembangunan Di Kota Medan. *Sibatik Journal* , 2, 1047-1054.
- Arief, T. M. (n.d.). Retrieved Juli Selasa, 2023, from Kompas.com: <https://medan.kompas.com/read/2022/11/19/065611678/ada-perubahan-arus-lalu-lintas-di-13-titik-kota-medan-berlaku-mulai-hari-ini?page=all>